

## KREDIT DI SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) MENJADI ALTERNATIF DITENGAH KRISIS KEUANGAN GLOBAL

H. Natsir Muhammad \*)

*Abstract : Collapse of companys share being based on housing credit at year-end 2008, making business perpetrator perforced moving and look for more other invesment type make a promise. Big scale banks have non-stoped to set eye on credit compartment in small medium micro business sector. This sector is potential value and more put up with crisis so that channeling of credit small medium bisness can become alternative in the middle of tardy the corporation sector. Credit to small medium business sector will become cake which is fought by a lot of bank because its market is which still very wide. That matter, various bank will be non-stoped to improve penetration of channeling of credit till year-end 2009, inclusive of channeling of through credit program of small effort people credit*

*Keyword: Small Medium Business, global financial crisis, credit, banks, financial global*

### Pendahuluan

Pilihan jatuh pada sektor perumahan di Amerika Serikat (AS). Dengan suku bunga yang dipatok hanya satu (1) persen, bisnis sektor perumahan laku keras dan memberikan tingkat keuntungan sebesar 50 persen dalam lima tahun. Keuntungan sebesar itu pada negara dengan tingkat inflasi di bawah tiga (3) persen, adalah sesuatu yang sangat menggiurkan. Bank-bank Eropa pun turut berlomba memberi pinjaman, dan lembaga-lembaga keuangan-perbankan tak mau ketinggalan. Terjadilah penumpukan pinjaman bank yang mencapai 1,3 triliun dolar di sektor perumahan AS. Sejak tahun 2005, harga rumah di AS berjatuh dan jumlah gagal bayar (*default*) mencapai 79 persen. Kebijakan The Fed yang menaikkan tingkat bunga menjadikan kehancuran tak terhindarkan. Terjadilah ledakan gagal bayar serta rentetan kebangkrutan perbankan dunia di sektor perumahan. IMF mencatat, kebangkrutan di sektor properti menggerogoti bank sebesar 945 miliar dolar AS.

Krisis keuangan di AS telah menyebabkan kekeringan likuiditas di pasar global. Karena kekurangan likuiditas, bank-bank di AS terpaksa menghentikan kucuran kreditnya. Bahkan, institusi-institusi keuangan AS dan Eropa harus mencairkan aset-aset mereka di negara berkembang untuk menutupi kerugian. Mereka menjual

saham dan surat utang di negara berkembang dengan harga berapa saja, lalu menukarnya ke dolar. Hal ini pula yang menjadikan harga saham di Indonesia berjatuh, dan pada saat bersamaan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Langkah cepat pemerintah AS yang menyiapkan dana talangan sebesar 700 miliar dolar AS, tidak banyak membantu. Artinya, kerusakan yang ditimbulkan oleh gagal bayar sektor perumahan jauh lebih besar. Dampak negatif bukan hanya terasa di negara maju, tetapi juga menyulitkan negara berkembang, seperti Indonesia. Walau pun pemerintah Indonesia konsisten menjalankan kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati (*prudent*), tetapi sebagai negara berkembang dengan sistem lalu lintas devisa gang sangat bebas, pasar keuangan Indonesia cenderung lebih fluktuatif dibandingkan negara lain.

### Turunnya Daya Beli dan Gelombang PHK

Dalam keadaan resesi (julukan bagi penurunan aktivitas ekonomi, setidaknya selama dua kuartal berturut-turut), bisnis lesu, dan laju pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini ditandai dengan menurunnya permintaan industri dunia akan komoditas. Resesi Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, ketiganya merupakan tujuan utama ekspor

produk Indonesia. Permintaan akan produk dan Indonesia pun merosot sehingga perusahaan produsen barang manufaktur dan produk primer (pertanian, pertambangan, perikanan, dan perkebunan) menjadi kesulitan memasarkan produknya. Pendapatan Indonesia dan ekspor pun menciut.

Persoalan semakin rumit karena perusahaan mesti menanggung beban tambahan dan melemahnya nilai tukar rupiah sehingga pengeluaran rupiah untuk membayar utang dan mengimpor bahan baku menjadi membengkak. Ditimpa lagi dengan beban bunga pinjaman bank. Apalagi, kini muncul desakan dan genakan dan buruh agar perusahaan menaikkan upah minimum. Semakin lengkaplah kerumitan persoalan dunia usaha, termasuk emiten. Dalam kondisi demikian, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) antara buruh dan perusahaan semakin terbuka lebar.

Hampir semua ekonom AS mengatakan bahwa resesi ekonomi AS akan berlanjut hingga tahun 2009. Ekonomi AS sudah berkontraksi 2,6 persen pada kuartal ketiga 2008. Kontraksi diperkirakan akan berlanjut ke kuartal pertama 2009 sehingga istilah resesi menjadi resmi dimulai. Konsekuensinya, pengangguran meningkat. Sepanjang Oktober 2008, pengangguran di AS bertambah sekitar 600.000 dan membuat total penganggur menjadi 10,1 juta orang. Ini adalah angka pengangguran tertinggi dalam 25 tahun terakhir di AS.

### **Krisis Nilai Tukar**

Sejumlah ekonom dunia termasuk peraih Hadiah Nobel Ekonomi. Paul Krugman yang awalnya optimis ekonomi AS tak akan sampai mengalami resesi. Kini mengakui kemungkinan kondisi akan semakin memburuk. Hal ini terutama dikaitkan dengan perkembangan terakhir di negara berkembang. Di mana dampak krisis global telah menyeret perekonomian dalam krisis nilai tukar yang berpotensi berkembang menjadi krisis mata uang terbesar yang pernah ada (*the mother of all currency crisis*).

Di Eropa Timur, dampak krisis global mengakibatkan resesi di sejumlah negara. Rontoknya nilai tukar akibat penarikan dana oleh investor yang dibarengi dengan anjloknya penerimaan ekspor dan tingginya inflasi, memunculkan risiko kebangkrutan seluruh ekonomi di Eropa Timur. Krugman mencemaskan akan terjadinya kearuhan tajam (*hard landing* nilai aset-aset dan perekonomian emerging markets dan ini berpotensi menjadi pemicu episentrum) krisis global baru (setelah krisis finansial AS) dalam beberapa bulan mendatang. Dampak krisis ini juga akan sangat memukul negara maju dan perekonomian global.

Di tengah-tengah gejolak sektor keuangan dunia, rupiah pun mengalami tekanan cukup signifikan. Pada bulan September rupiah cukup tenang di bawah level Rp 10.000. Namun, setelah itu rupiah mengalami pelemahan terus-menerus. Pada bulan November bahkan sempat menembus level Rp 13.000 per dolar AS. Walaupun akhirnya mengalami penguatan, rupiah tampak sulit untuk menguat ke bawah level Rp 12.000 per dolar AS.

Sebelumnya, pemerintah justru mendapatkan keuntungan kurs dan target nilai tukar yang ditetapkan di APBN-P 2008 adalah Rp 9.100 per dolar. Sedangkan rata-rata nilai tukarnya lebih rendah. Untuk utang dalam dolar AS, masih bisa terkompensasi dan kenaikan kurs dalam sembilan bulan. Sementara utang dalam yen, pembayaran pinjaman cukup banyak karena rupiah terkoreksi cukup tajam terhadap yen.

Pelemahan rupiah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang menuju krisis seperti tahun 1997-1998. Banyak rumor beredar yang menyebutkan bahwa rupiah akan melemah terus ke level yang lebih rendah lagi. Lantas berapakah nilai tukar rupiah yang wajar? Untuk melihat arah pergerakan rupiah dalam jangka pendek, salah satu model yang dapat digunakan adalah *model Purchasing Power Parity* (PPP) maupun *model International Fisher Effect* (IFE). Kedua model ini

menggunakan perbedaan tingkat bunga dan inflasi antar negara dalam penentuan nilai tukar. Pada saat nilai rupiah terhadap dollar AS berada di kisaran Rp 9.000 di awal tahun 2008, saat itu tingkat bunga di AS sebesar 5 persen dan di Indonesia 12 persen. Saat ini, dengan tingkat bunga di AS hanya 1 persen dan di Indonesia hingga 18 persen, maka nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang wajar berada pada kisaran Rp 10.350 sampai dengan Rp 10.600.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih berpeluang untuk menguat jika tingkat bunga di Indonesia bisa diturunkan di tahun 2009. Di sisi lain, bila diperhatikan keadaan ekonomi, baik global maupun domestik, terdapat banyak faktor yang mendukung penguatan rupiah. Antara lain permintaan rupiah dalam negeri yang masih kuat karena aktivitas perekonomian yang cukup baik dan dampak resesi global yang relatif kecil terhadap Indonesia dibandingkan dengan terhadap negara tetangga.

Dalam situasi krisis seperti saat ini, kebijakan moneter seharusnya lebih ditujukan untuk mendorong pertumbuhan dan memperluas kesempatan kerja. Kebijakan moneter yang ditujukan semata untuk mengendalikan harga atau inflasi tidak lagi efektif, terlebih pada saat krisis saat ini. Dalam situasi krisis, sebaiknya BI Rate diturunkan mengingat tekanan inflasi ke depan akan berkurang seiring melambatnya perekonomian. Penurunan BI Rate justru dapat menahan jatuhnya perekonomian secara tajam. BI Rate yang rendah akan membuat suku bunga kredit menurun sehingga menjadi stimulus bagi kegiatan sektor riil. Suku bunga yang rendah juga mengurangi risiko kredit bermasalah dan beban pemerintah membayar bunga utang dalam negeri.

### **Kredit UMKM Menjadi Alternatif**

Bank-bank berskala besar terus mengincar pangsa kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM ini dinilai potensial dan lebih tahan menghadapi krisis. Apalagi, kredit di sektor UMKM dikenal lebih kebal

terhadap potensi kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) karena sifatnya yang fleksibel dan adaptif terhadap permasalahan. Kredit ke sektor UMKM akan menjadi kue yang diperebutkan banyak korporat mengingat pasarnya yang masih sangat luas. Terkait hal itu banyak korporat perbankan akan terus meningkatkan penetrasi penyaluran kredit UMKM hingga akhir tahun. Termasuk penyaluran lewat program kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran kredit meningkat dengan target pertumbuhan di kisaran 22 - 24 persen.

Tahun lalu penyaluran UMKM dari Mandiri mencapai Rp 20 triliun tumbuh sekira 81 persen dibanding tahun sebelumnya, yang semula dikenal hanya lewat kredit korporasi sudah sejak empat tahun terus meningkatkan portofolio kredit UMKM-nya. Di senap segmen, termasuk di kredit UMKM perseroan menargetkan mampu menguasai 20-30 persen pangsa pasar. Pertumbuhan kredit UMKM banyak ditopang oleh pertumbuhan Unit Mikro Mandiri tersebut. *Portofolio* Bank Mandiri dalam kredit usaha rakyat (KUR) akan ditingkatkan. Per akhir November 2008 penyaluran KUR di Bank Mandiri sudah mencapai Rp 1,13 triliun atau 10 persen dan total penyaluran KUR.

PT Bank CIMB-Niaga Tbk menargetkan penyaluran kredit hingga akhir tahun menjadi Rp 73,3 triliun. Itu berarti bertambah Rp 1,5 triliun dari posisi kredit pada neraca pembukaan hasil merger kedua bank pada awal November di posisi Rp 71,8 triliun. Direktur Korporasi PT Bank CIMB-Niaga Tbk Catherine Hadiman mengatakan, target tambahan kredit sebesar Rp 1,5 triliun itu akan disalurkan ke sektor komersial, konsumen, dan korporasi. Khusus untuk sektor korporasi, bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Grup CIMB itu bakal menggelontorkan kredit tambahan sebesar Rp 500 miliar. "Masih ada ruang untuk penyaluran itu ke sejumlah sektor, meski secara umum mungkin ada pelambatan." ujar Catherine di Jakarta, Senin 8 Desember.

Turbulensi finansial global sambung dia, akan membuat korporasi-korporasi melakukan adaptasi terhadap kondisi yang kurang menguntungkan. Perlambatan ekonomi negara mau, yang membuat ekspor perusahaan di tanah air menurun, mau tidak mau membuat pelaku usaha melakukan diversifikasi pasar. Dia mencontohkan debitur pihaknya di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang kini, di tengah ancaman perlambatan, terus-menerus mencari pasar baru.

Secara umum perseroan masih akan membidik sektor-sektor strategis, seperti perkebunan, pertambangan, infrastruktur, manufaktur, dan telekomunikasi untuk penyaluran kredit di sektor korporasi. Terutama di sektor telekomunikasi pasarnya masih sangat besar. Dalam kondisi krisis Perseroan akan mencari sektor-sektor baru yang relatif kebal terhadap ancaman krisis. Sementara sektor perkebunan dan pertambangan yang dihantui oleh ancaman penurunan harga komoditas tetap akan mendapatkan porsi, namun seleksi akan dilakukan secara lebih ketat. Perseroan juga akan mencermati kinerja debitur. Debitur lama yang kinerjanya bagus tentu masih akan terus didukung. Terkait ekspansi bisnis, CIMB-Niaga berencana akan masuk ke sektor kredit mikro. Perseroan mengangap pasar di sektor tersebut masih besar, kendati para pemainnya juga terus bertambah. Ada 44 juta calon debitur mikro, dan yang tersentuh baru 10 juta.

Pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 25 basis poin dari 9,50 persen menjadi 9,25 persen merupakan kado istimewa dan bank sentral di penghujung tahun 2008. Walaupun penurunannya hanya 0,25 persen, diharapkan kado istimewa ini dapat memacu perekonomian Indonesia, khususnya kepada perbankan dan sektor ril. Walaupun banyak kalangan yang menilai penurunan 0,25 persen tersebut masih kurang namun paling tidak mau berpikir positif bahwa inilah niat baik BI untuk berperan dalam rangka memulihkan perekonomian yang sedang terancam krisis dunia. Kita berharap, tren penurunan

BI Rate dapat menimbulkan efek positif pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Terkait penurunan suku bunga kredit, maka seharusnya kalangan perbankan dapat merespons positif terhadap penurunan BI Rate ini walaupun kalangan perbankan mengatakan bahwa penurunan ini belum signifikan, maka kita harus bertanya kepada perbankan di level poin berapakah yang dianggap signifikan untuk ikut menurunkan suku bunga kredit?

Kalangan perbankan harus *fair* melihat penurunan BI Rate ini dalam artian bahwa perbankan juga harus ikut menurunkan suku bunga kreditnya paling tidak setara atau senilai dengan penurunan BI Rate. Kalau BI Rate turun 0,25 persen, paling tidak perbankan juga harus menurunkan suku bunga kreditnya yang kira-kira setara dengan 0,25 persen penurunan BI Rate, atau sesuai dengan *pricing rate* dan masing-masing individual bank yang tetap mengacu kepada *cost of fund* yang menjadi acuan pokok pada penentuan *base lending rate*. Sehingga, bisnis dan peran perbankan sebagai lembaga intermediasi tetap dalam koridor saling menguntungkan. Sehingga sektor ril maju, industri perbankan berkembang.

Bidang property merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan hampir 100 persen menggunakan produk domestik dan terdapat kurang lebih 80-an sektor usaha yang terkait dengan pembangunan perumahan, apabila semua semua sektor ini serentak bergerak maka dapat dibayangkan betapa bergairahnya perekonomian. Sebagai contoh, jika masing-masing sektor mempekerjakan 10 orang, maka akan ada 800 orang ditambah keluarga mereka yang akan terjamin kehidupannya. Itu baru di sektor properti saja.

Data Net Interest Margin (NIM) perbankan atau selisih pendapatan bunga dan biaya bunga sampai dengan saat ini mencapai 5,28 persen. Angka ini termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Dalam menyikapi dampak krisis global, diharapkan semua pihak terkait sama-sama men-

ciptakan efektivitas produksi termasuk dalam menurunkan margin. Kerelaan perbankan untuk menekan NIM tersebut, untuk menghindari stagnasi industri yang akan menyebabkan dampak lebih buruk, dan dirasakan oleh pelaku usaha, masyarakat terlebih lagi terhadap perbankan sendiri.

Sikap skeptis terhadap perkiraan inflasi tinggi, tidak terbukti. Malah kecendrungan sekarang ini trennya menuju ke angka deflasi. Termasuk keraguan akan tingginya non performing loan (NPL), atau kredit bermasalah, sampai dengan saat ini masih pada tatanan angka kondisi wajar.

Menyikapi tingginya *loan to deposit ratio* (LDR) perbankan khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, maka disarankan kepada pemerintah untuk lebih detail lagi melihat mana bank yang telah memberikan bobot persentase LDR yang besar. Sehingga, kita dapat melihat lebih jelas bank yang telah memberikan kontribusi dan loyalitas terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulsel. Kita ketahui bahwa bank yang memiliki LDR tinggi berarti terdapat kelebihan penyaluran kredit dibanding penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang ada pada bank tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa bank dengan kondisi seperti ini, merupakan bank sangat loyal terhadap komitmennya dalam menjalankan penannya sebagai lembaga intermediasi.

Namun, di sisi internal bank tersebut termasuk dalam kolektibilitas yang kurang baik. Hal ini jelas disebabkan oleh permasalahan likuiditas. Nah, apabila ini tidak disikapi maka pihak bank secara otomatis akan mencari dana-dana mahal yang akan berdampak ke tingginya *cost of fund*, dan secara otomatis akan berpengaruh kepada sub bunga kredit. Disinilah peran pemerintah, instansi instansi BUMN, BUMD atau lembaga lembaga yang memiliki *idle fund*, untuk dapat menempatkan *fresh fund* pada bank-bank yang memiliki LDR yang tinggi. Manfaatnya, dapat terhindar dan tingginya *cost of fund* yang akan membenikan kontribusi kepada penurunan

suku bunga kredit. Di samping itu bank-bank yang masih memiliki LDR rendah, dapat lebih mengoptimalkan penyaluran kreditnya sehingga dapat menjadikan penguatan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

### **Dorong Kredit Investasi**

Porsi kredit investasi perbankan lebih kecil dibandingkan dengan kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Menurut data Kantor Bank Indonesia (KBI) Surabaya kontribusi kredit investasi sampai dengan September 2008 hanya sebesar Rp 12,698 triliun dan total kredit Rp 112,313 triliun. Untuk meningkatkan porsi kredit investasi, Bank Indonesia (BI) mendorong agar perbankan menyalurkan kredit investasi. Investasi merupakan salah satu faktor utama pendorong ekonomi. Dengan investasi kapasitas ekonomi suatu daerah akan membesar. Sehingga dapat memproduksi lebih banyak lagi barang dan jasa untuk dijual.

Diajuga mengatakan, dengan modernisasi alat produksi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sudah terbukti bahwa negara-negara yang melakukan investasi secara agresif mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun demikian, dia juga memperingatkan bahwa dalam dunia bisnis investasi berarti komitmen jangka panjang. Artinya risikonya juga tinggi dan mengandung ketidakpastian. Menurut dia wajar bila dunia bisnis menginginkan adanya rasa aman dan kepastian sebelum berinvestasi. Kegiatan investasi tentu sangat terkait dengan berbagai faktor, di antaranya melihat potensi pasarnya, faktor perizinan, sarana dan prasarana, dan terpenting faktor pembiayaan. Saat ini sektor perbankan menghadapi kendala untuk menyalurkan kredit investasi salah satunya permasalahan penurunan permintaan pasar karena krisis ekonomi global.

Di satu sisi inflasi cenderung naik dan nilai tukar rupiah masih berfluktuasi, serta tingkat inflasi cenderung naik. Di pasar modal masih mengalami tekanan. Perbankan sulit memprediksi kondisi yang

akan datang mengingat investasi ini sifatnya jangka panjang. Pilihannya perbankan harus dapat melihat sektor yang berpotensi saat ini. Sektor pangan menduduki peringkat terpenting, seperti sektor agribisnis. Dia menyebutkan seperti pabrik gula yang telah berdiri sejak zaman kolonial, dan membutuhkan pembaruan peralatan.

Selain itu sektor pengembangan infrastruktur termasuk sarana transportasi dan listrik. Untuk pemberian kredit tersebut, perbankan memilih menyalurkan kredit dengan cara sindikasi. Selain mengatasi keterbatasan BMPK (batas minimum pemberian kredit) juga mengurangi tingkat risiko, persaingan, dan dapat mensinergikan kemampuan masing-masing bank. Bila pengembangan infrastruktur seperti sarana transportasi dan listrik terpenuhi, selanjutnya dapat mendorong perniagaan investasi perbankan.

Data menunjukkan bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan sebesar Rp19,99 triliun. Sebanyak, 3,81% adalah kredit untuk investasi. Kondisi sektor perbankan yang mendukung sepenuhnya terhadap perkembangan investasi ini juga sudah disusul dengan komitmen perbankan melalui regulasi yang mulai membuka jalan bagi lancarnya arus pembiayaan ke investor. Selain itu, tingkat suku bunga juga mulai menggairahkan kinerja investasi. Sama halnya dengan kebijakan perpajakan. Beberapa keringanan pajak seperti PPh juga bisa membantu investor menyehatkan usahanya melalui kinerja yang lebih baik dan produksi yang lebih banyak. Meski faktor-faktor ekonomi seperti perbankan dan perpajakan serta tingkat suku bunga tersebut telah menunjukkan dukungannya. Namun, masih ada dimensi lain yang mesti pula diperhatikan karena sedikit banyak juga memiliki pengaruh pada iklim investasi.

Kestabilan politik pemerintahan saat ini menjadi satu faktor awasnya kalangan investor untuk berinvestasi di Sulsel. Proses Pilkada Sulsel yang masih berbuntut panjang dan masih menjadi tanda tanya

besar apakah kondisi daerah ini bisa stabil dalam bulan-bulan mendatang. Sama halnya dengan krisis sosial masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat kriminalitas daerah ini yang masih cukup tinggi karena masih banyaknya pengangguran.

Di sisi lain, faktor utama yang menjadi keluhan kalangan investor adalah masalah pertanahan untuk membangun usaha. Ini tidak terlepas dan dukungan peminat yang masih minim. Birokrasi pemerintah yang mengurus perizinan usaha terkadang mempersulit, prosedur yang telaif ditetapkan. Inilah yang menjadi kendala investasi selama ini sehingga masih kurang berkembang. Salah satu fakta yang menunjukkan investasi di Sulsel masih terkendala adalah Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) di Kotamadya Parepare belum berfungsi optimal. Padahal, kawasan ini dibentuk untuk memperbaiki iklim investasi di daerah. inilah yang dinilai bahwa iklim investasi di Sulsel masih belum berkembang baik sesuai harapan. Meski secara teori, ada beberapa faktor penentu tingkat investasi diantaranya, suku bunga, prediksi tingkat keuntungan, prediksi mengenai kondisi ekonomi ke depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan keuntungan perusahaan. Namun begitu, faktor-faktor di lapangan justru jauh lebih kompleks untuk mempengaruhi tingkat investasi. Jadi BI harus mampu mengerem laju inflasi semaksimal mungkin agar BI Rate tidak sampai naik pada tahun 2008. Kenaikan BI Rate hanya akan memukul industri lokal dan UKM.

Pangsa kredit atau pembiayaan di sektor ini apabila dibandingkan dengan total kredit mencapai 54,45% pada triwulan II tahun ini. Bahkan, pada akhir tahun, terlihat pangsa kredit UKM juga masih tetap mendominasi. BI memang mengarahkan pembiayaan perbankan ke sektor UKM. Bahkan, masing-masing bank menargetkan pertumbuhan kredit pada sektor ini sebesar 24%. Yang jelas, memang mendominasi kredit adalah UKM, karena kita mengacu pada arahan BI juga, supaya

perbankan menghidupkan sektor UKM. Sektor ini memang menguntungkan bagi perbankan dibandingkan sektor ritel. Sehingga pada 2008 mendatang, perbankan diharapkan masih fokus untuk pembiayaan UKM. Bagaimanapun, sektor ini sangat menarik bagi perbankan untuk dibiayai karena sangat prospektif.

Berdasarkan data, jumlah kredit yang telah disalurkan baik bank umum maupun BPR mencapai Rp 10,82 triliun pada triwulan II tahun 2007. Nominal ini meningkat dibandingkan pada posisi Maret atau triwulan I 2007 yakni Rp 9,84 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi akhir 2006 lalu, pertumbuhan kredit di Sulsel mencapai 10,52%. Posisi ini sedikit lebih besar dibandingkan target nasional yang diharapkan BI sebesar 10% pada semester awal 2007. Sementara itu, jumlah kredit bermasalah atau NPL di Sulsel tercatat sebesar Rp 2,54 triliun untuk bank umum pada triwulan dua tahun 2007. Nilainya sedikit meningkat dibanding triwulan awal yakni Rp 2,49 triliun. Meski demikian, secara rasio perbankan Sulsel mencatat penurunan. Pada triwulan I tahun 2007 sebesar 13,62% menurun menjadi 12,80% pada triwulan II. Hampir semua perbankan respek terhadap pembiayaan sektor ini. Hal tersebut terlihat dan kinerja intermediasi.

Perbankan di Sulsel meningkat dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar 89,04%. Pada triwulan II, kinerja intermediasi perbankan mencapai 91,10%. Bank umum mencapai 90,90% dan BPR mencapai 140,73%. Untuk kondisi NPL masih aman. Namun, UKM juga mesti memandang perbankan sebagai mitra bahwa dana yang diberikan itu dana masyarakat, sehingga wajib dikembalikan. Pembiayaan UKM karena minim risiko. Jika seandainya perbankan memiliki sistem yang baik, otomatis semua pembiayaan UKM bisa terkover. .

Semua nasabah UKM sebanyak 96% merupakan nasabah yang meminjam dibawah Rp 5 miliar. Rata-rata peminjaman Rp 10 juta per nasabah. Khusus untuk nasabah mikro, BRI mencatat sekitar

234.000 orang dengan outstanding mencapai Rp 3,1 triliun.

### **Pengusaha Ingin Bunga Acuan Delapan Persen**

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap Bank Indonesia (BI) mau melanjutkan tren penurunan suku bunga acuan (BI rate) hingga mencapai delapan persen tahun depan. Dengan begitu, margin keuntungan yang diterima pengusaha tidak habis untuk membayar bunga. Kalau bunganya tinggikan margin kita habis hanya untuk itu. Padahal seharusnya bisa untuk menambal investasi yang lain. Menurut dia, keputusan BI yang telah menurunkan suku bunga dan 9,50 persen menjadi 9,25 persen menunjukkan bahwa sudah ada keberpihakan terhadap sektor ril.

Namun dia mengaku bahwa penurunan itu masih sangat kecil dibanding biaya yang harus dikeluarkan pengusaha. Pihaknya berharap setidaknya suku bunga acuan bisa lagi diturunkan hingga menjadi sembilan persen dalam waktu dekat ini. Andai hal itu tidak bisa dilakukan hingga akhir tahun ini, maka pihaknya berharap awal tahun depan angka itu sudah dapat tercapai. Kalau cuma turun 0,25 basis poin itu sangat kecil. Dia menilai masih ada ruang terjadi penurunan suku bunga acuan ke angka yang lebih kecil. Sebab, inflasi saat ini cenderung terus menurun. Inflasi bulan November sudah mencapai 0,12 persen.

Pihaknya berharap inflasi akan terus menurun hingga tahun depan sehingga potensi terjadinya penurunan suku bungan acuan semakin terbuka. Kalau inflasi turun sudah seharusnya BI menurunkan suku bunga. Dengan BI rate yang semakin rendah dia berharap akan memicu tuturnya *lending rate* (suku bunga pinjaman). Dia mencontohkan, jika BI rate di angka 9,25 persen maka *lending rate* akan berada di posisi 11-16 persen, sedangkan jika BI rate sudah turun ke angka sembilan persen maka *lending rate* bisa mencapai 10-13 persen. Bank baru akan bisa bernafas lega

kalau BI rate berada di angka delapan persen sehingga *lending rate* menjadi 10 persen.

Namun itu semua tidak cukup untuk menggerakkan dunia usaha jika permasalahan yang lain seperti, infrastruktur yang buruk, pungli dan retribusi yang terlalu banyak masih ada.

### Penutup

Ambruknya saham perusahaan-perusahaan yang berbasis Kredit Perumahan akhir tahun 2008, menjadikan pelaku bisnis terpaksa henggang dan mencari jenis investasi lainnya yang lebih menjanjikan. Bank-bank berskala besar terus mengincar pangsa kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sektor UMKM ini dinilai potensial dan lebih tahan menghadapi krisis sehingga penyaluran kredit UMKM bisa menjadi alternatif di tengah melambatnya sektor korporasi. Kredit ke sektor UMKM akan menjadi kue yang diperebutkan banyak bank mengingat pasarnya yang masih sangat luas. Terkait hal itu, berbagai bank akan terus meningkatkan penetrasi penyaluran kredit UMKM hingga akhir tahun, termasuk penyaluran lewat program kredit usaha rakyat (KUR).

Akhir tahun 2008 terlihat pangsa kredit UKM juga masih tetap mendominasi. BI memang mengarahkan pembiayaan perbankan ke sektor UKM. Bahkan, masing masing bank menargetkan pertumbuhan kredit pada sektor ini sebesar 24%. Yang jelas, memang mendominasi kredit adalah UKM, karena kita mengacu pada arahan BI juga, supaya perbankan menghidupkan sektor UKM. Sektor ini memang menguntungkan bagi perbankan dibandingkan sektor ritel. Sehingga pada 2009 mendatang, perbankan diharapkan masih fokus untuk pembiayaan UKM. Bagaimanapun, sektor

ini sangat menarik bagi perbankan untuk dibiayai karena sangat prospektif.

### Daftar Rujukan

Achmad, Yakin, 2007. *Kredit UMKM Perlu Disubsidi*. Seputar Indonesia, Sabtu, 29 Desember 2007, Jakarta

Arman, Agus. 2008. *Krisis Keuangan Global dan Prospek Bursa Indonesia*. *Fajar*, Selasa, 9 Desember 2008, Makassar

Harifuddin, 2007. *Saatnya Memperkuat Ekonomi Berbasis Kerakyatan*. *Fajar*, Sabtu 29 Desember 2007, Makassar.

Judiseno, R.K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. PT RajaGrafinndo Persada, Jakarta.

Ondong, Yudi. 2008. *Saatnya Perbankan Koreksi Bunga Pinjaman*. *Fajar*, Selasa, 9 Desember 2008, Makassar.

Tahir, Hikmah, 2007. *Dukungan Perbankan, Lancarkan Investasi*. Seputar Indonesia, Sabtu, 29 Desember 2007, Jakarta

Tayibnapi, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Rineka Cipta, Jakarta

Sadgrove, Kit. 1997. *The Complete Guide in Business Risk Management*. Gower Publishing Limited, England.

Umar, Husein. 2003. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

\*) Penulis adalah Staf Pengajar Pada STIM Nitro Makassar